



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI RABU, 20 MARET 2013



DAFTAR ISI

Tol Bali	1
Kendala Infrastruktur	2
Infrastruktur Jalan	3
Proyek Monorel	4
Pelabuhan	5
Bandara	6
Tol Surabaya - Mojokerto	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bali Tol Tunggu Persetujuan Menteri PU	<div>- Siapapun yang masuk asalkan pembangunan jalan tol tetap berjalan sesuai jadwal dan akan lebih baik jika investor yang masuk perkuat konsorsium</div> <div>- Saat ini pembangunan konstruksi jalan tol sudah memasuki tahap pemasangan badan jalan ke tiang pancang</div>		2013		Pemprov Bali Pemkab Badung PT. Jasa Marga,Tbk PT. Pelindo III PT. Angkasa Pura I PT. Hutama Karya PT. Adhi Karya,Tbk PT. Pengembangan Pariwisata Bali	Tahap Pemasangan badan jalan ke tiang pancang atau sekitar 84%

Bali Tol Tunggu Persetujuan Menteri PU

DENPASAR—Investor jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua, PT Jasamarga Bali Tol masih menunggu persetujuan izin perubahan susunan pemegang saham yang saat ini sudah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Thomas Moles & Ashari Purwo
redaksi@bisnis.com.id

Akhmad Tito Karim, Direktur Utama Jasamarga Bali Tol, mengatakan perubahan susunan pemegang saham jalan tol di atas perairan Bali itu sudah di tangan Menteri PU Djoko Kirmanto.

Setelah persetujuan turun, perseroan sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) akan segera menyerahkan amendemen kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Tahapan itu masih kami jalani. Kami berharap surat itu segera turun," katanya kepada Bisnis, Selasa (19/3).

Akhmad memaparkan perubahan komposisi itu menyusul mundurnya PT Wijaya Karya Tbk (Wika) dari kepemilikan saham di Jasamarga Bali Tol dan masuknya Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

Saat ini, paparnya, komposisi saham Jasamarga Bali Tol menjadi Pemprov Bali 8,01% dan Kabupaten Badung 8,01%, PT Jasa Marga Tbk 55% dari sebelumnya 60%, PT Pelindo III menjadi 17,98% dari sebelumnya 20%, PT Angkasa Pura I menjadi 8% dari sebelumnya 10%. PT Hutama Karya menjadi 1% dari sebelumnya sebesar 2%, PT Adhi Karya Tbk menjadi 1% dari sebelumnya 2%. Adapun PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap 1%.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengungkapkan Badan PT Jasamarga Bali Tol perlu melapor-

kan perubahan komposisi saham kepada lembaganya terkait dengan perubahan komposisi saham di perusahaan tersebut.

Dia tidak memperlakukan siapa pun yang masuk asalkan pembangunan jalan tol tetap berjalan sesuai jadwal dan akan lebih baik jika investor yang masuk memperkuat konsorsium.

"BUJT-nya perlu melaporkan perubahan saham itu karena terjadi sebelum jalan itu beroperasi, kalau terjadi setelah beroperasi tidak perlu lapor," paparnya di Jakarta, Selasa, (19/3/2013).

Gani menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima dokumen pengajuan perubahan kepemilikan saham dalam tubuh Jasamarga Bali Tol. Kendati demikian, pihaknya tidak terlalu mendesak perusahaan itu karena yang terpenting ialah jalan tol itu selesai tepat waktu, guna mendukung penyelenggaraan APEC 2013 pada Oktober mendatang.

Dia menjelaskan Wika telah menyurati Kementerian PU yang berisi perseroan mundur dari PT Jasamarga Bali Tol karena hendak mengembangkan usaha di sektor lain. Namun penyelesaian perubahan itu harus melalui BJT yang melapor ke BPJT. Jalan tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua sepanjang 11,5 kilometer itu ditargetkan selesai pada bulan Juni tahun ini.

Sebelum beroperasi, papar Gani, pihaknya bersama dengan Kementerian Perhubungan akan melakukan uji operasi untuk menilai kelayakan jalan tol itu.

Jika belum layak, pihaknya akan meminta operator memperbaiki kekurangan jalan tol tersebut terlebih dahulu.

Akhmad Tito menuturkan pada 2012, Provinsi Bali telah menganggarkan Rp65 miliar untuk ikut berinvestasi di jalan tol pertama di Bali itu. "Karena belum terealisasi pada 2012,



Jalan tol Bali membutuhkan sedikitnya 13.700 tiang pancang

Biznis/Wahyu Darmawan

anggaran yang telah masuk pada APBD 2012 itu dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD 2013 dengan penambahan Rp35 miliar."

Kabupaten Badung juga berencana menginvestasikan dana dengan jumlah sama, yakni Rp100 miliar. Dana itu akan diserahkan secara bersamaan setelah Menteri PU Djoko Kirmanto menyetujui.

Untuk selanjutnya, amendemen perjanjian perusahaan jalan tol (PPTT) akan dilakukan.

Akhmad mengklaim tertahannya persetujuan izin perubahan susunan pemegang saham di Kementerian PU itu tidak mengganggu jalannya pengerjaan proyek.

"Saat ini pengerjaan konstruksi sudah 84%."

Pada Juli tahun lalu, Jasamarga Bali Tol, memperoleh kredit sindikasi Rp1,73 triliun dari enam bank nasional untuk mendanai pembangunan jalan tol tersebut.

Akhmad Tito saat itu menjelaskan kapasitas modal perusahaannya untuk mendanai proyek tersebut hanya sekitar Rp500 miliar dari total kebu-

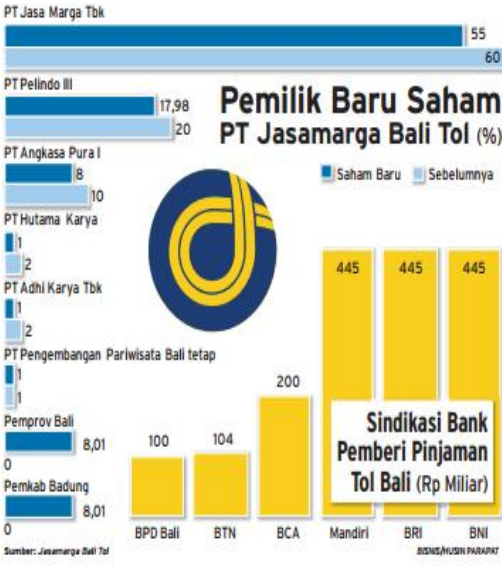
tuhan investasi yang mencapai Rp2,4 triliun.

Untuk menyelesaikan pembangunannya, 70% pendanaannya atau Rp1,73 triliun didapat dari kredit sindikasi enam bank nasional, dengan tenor 5 tahun dan bunga tetap 10% selama masa konstruksi.

Saat ini pembangunan konstruksi jalan tol pertama di Bali itu sudah memasuki tahap pemasangan badan jalan ke tiang pancang.

Berdasarkan data Jasamarga Bali, konstruksi yang akan dipasang sebanyak 13.700 tiang pancang yang saling menghubungkan beton jalan.

Pembangunan konstruksi digenjot agar rampung pada triwulan I/2013 dan bisa menjalani tes kelayakan pada April 2013. (sufitral)





Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pendanaan & Lahan Masih Jadi Kendala	<div>- Rasio investasi infrastruktur di Tanah Air periode 2010-2012 hanya sekitar 3%-4% terhadap PDB</div> <div>- Fasilitas dana penjaminan dinilai sebagai insentif yang paling dibutuhkan oleh kontraktor</div> <div>- Pihak swasta enggan berinvestasi di sektor infrastruktur karena minimnya insentif dari pemerintah</div>					

► INFRASTRUKTUR DI TANAH AIR

Pendanaan & Lahan Masih Jadi Kendala

JAKARTA—Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terkendala sumber pendanaan jangka panjang dan pembebasan lahan. Akibatnya, rasio investasi infrastruktur tercatat hanya sekitar 3%-4% terhadap PDB.

Ana Noviani
ana.noviani@bisnis.co.id

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan salah satu kendala pembangunan infrastruktur

► Rasio investasi infrastruktur di Tanah Air periode 2010-2012 hanya sekitar 3%-4% terhadap PDB.

► Fasilitas dana penjaminan dinilai sebagai insentif yang paling dibutuhkan oleh kontraktor.

► Pihak swasta enggan berinvestasi di sektor infrastruktur karena minimnya insentif dari pemerintah.

tur di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan dana jangka panjang. "Menurut saya, masalah infrastruktur di Indonesia itu *financing* jangka panjang yang terbatas. Selain itu, masalah eksekusi di lapangan, masalah lahan" tuturnya di Kemenkeu, Selasa (19/3).

Bambang menuturkan saat ini pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air di antaranya Kerja Sama Pemerintah Swasta (PPP/*public private partnership*), fasilitas dana penjaminan (*guarantee fund*), dan fasilitas *viability gap fund* (VGF).

Kemenkeu, sambungnya, akan mengembangkan *project development facility* (PDF) untuk persiapan proyek. Dukungan fiskal tersebut, imbuhnya, sudah terbilang lengkap dibandingkan dengan dukungan PPP bidang infrastruktur yang diterapkan negara lain.

"Problemnya adalah di eksekusi, baik di tanah maupun komitmen di *contracting agency*," tegas Bambang.

Bambang menambahkan dari sederet insentif fiskal yang disiapkan pemerintah, fasilitas dana penjaminan dinilai sebagai insentif yang paling dibutuhkan oleh kontraktor.

Dalam APBN 2013, dukungan dan jaminan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp2,88 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari alokasi *land capping* Rp500 miliar, fasilitas dana geothermal (*geothermal fund*) Rp1,13 triliun, kewajiban penjaminan pemerintah untuk *fast track project phase I*, percepatan penyediaan air minum, dan *Central Java Power Plant* Rp706 miliar.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran VGF senilai Rp341 miliar dan fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp211,7 miliar.

ENGKAN INVESTASI

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Apindo Sofjan wanandi menilai belum memadainya pembangunan infrastruktur menyebabkan biaya logistik dan distribusi menjadi tinggi.

Pihak swasta, imbuhnya, cenderung enggan berinvestasi di sektor infrastruktur karena kurang mendapat insentif dari pemerintah.

"Swasta tidak mau bangun infra-

struktur kalau tidak ada insentif dan kepastian jangka panjang," tuturnya.

Bank Dunia dalam laporan *Indonesia Economic Quarterly* edisi Maret 2013 juga menyoroti belum memadainya investasi infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut berisiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena tingginya biaya transportasi dan logistik.

Berdasarkan data Bank Dunia, rasio investasi infrastruktur di Indonesia sepanjang 1993-1997 mencapai 7% terhadap PDB. Namun pada periode 2010-2012 cenderung turun ke kisaran 3%-4% PDB. Padahal rasio investasi infrastruktur di negara berkembang adalah 5% terhadap PDB.

"Investasi infrastruktur swasta telah turun, sementara itu, desentralisasi telah mendorong peningkatan proporsi pemda, terutama fokus terhadap jalan daerah," tutur Jim Brumby, Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia, Senin (18/3).

Lebih lanjut Bank Dunia menekankan pentingnya investasi infrastruktur untuk mengimbangi tingginya laju urbanisasi di Indonesia.

Peningkatan jumlah, kualitas, dan efisiensi investasi infrastruktur dapat membantu membuka manfaat ekonomi dari aglomerasi perkotaan dan mendukung kualitas layanan masyarakat. ■



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Walikota Pastikan Tidak Ada Ganti Rugi	<div>- Ganti rugi lahan tak dianggarkan dalam APBD Padang 2013</div> <div>- Warga akan melayangkan gugatan hukum kepada Pemerintah Kota Padang</div>					

PEMBANGUNAN JALAN

Wali Kota Pastikan Tidak Ada Ganti Rugi

PADANG, KOMPAS — Wali Kota Padang Fauzi Bahar, Selasa (19/3), mengatakan, tak ada ganti rugi untuk lahan dan tanaman milik sebagian warga Kelurahan Bungus Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, yang menjadi lokasi pembangunan jalan lingkaran timur Kota Padang. "Tak ada anggaran untuk ganti rugi," katanya, di Padang.

Sehari sebelumnya, seratusan warga Bungus Timur mempertanyakan hak ganti rugi itu kepada sejumlah anggota DPRD Kota Padang. Hak itu sudah dituntut sejak setahun lalu (*Kompas*, 19/3). Senada dengan Fauzi, sejumlah anggota DPRD, yang Senin lalu menemui warga, mengatakan, ganti rugi lahan dan tanaman bagi warga tak dianggarkan dalam APBD Padang 2013.

Menurut Fauzi, pembangunan

jalan itu dikerjakan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa, yang salah satu tujuannya untuk menghemat biaya. Pembangunan jalan yang sementara terhenti akan kembali dimulai segera setelah anggaran tambahan dikucurkan.

Gugatan hukum

Koordinator Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Padang Deddi Alparesi, yang mendampingi warga Bungus Timur, mengatakan, akan melayangkan gugatan hukum kepada Pemerintah Kota Padang. "Kami akan layangkan gugatan perdata dan pidana mengenai kerusakan dan perampasan lahan," katanya.

Menurut Deddi, penunjukan panitia pembebasan tanah dan lahan tidak pernah dilakukan pe-

merintah dalam pembangunan jalan itu. Padahal, hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selain itu, lanjut Deddi, soal ganti rugi itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Terkait lokasi pembangunan jalan itu, yang sebagian di antaranya melewati kawasan hutan lindung, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia menuturkan, izin pinjam pakai kawasan hutan lindung itu disetujui Menteri Kehutanan pada 5 Oktober 2012. (INK)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☒ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Sumsel Incar Investor Jepang	<div>- Pemerintah akan membuat tim percepatan pembangunan monorel melalui Surat Keputusan Gubernur Sumsel untuk mendorong terealisasinya proyek transportasi itu</div> <div>- Sumsel akan berkunjung ke Jepang untuk menawarkan langsung proyek monorel</div> <div>- Sudah banyak investor asal Korea dan Amerika Serikat yang tertarik untuk berinvestasi di Sumsel dalam pembangunan monorel</div>			US\$20juta per kilometer	Pemprov Sumsel	

► PROYEK MONOREL

Sumsel Incar Investor Jepang

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumsel akan menawarkan mega proyek monorel kepada investor Jepang di mana nilai investasi yang dibutuhkan sekitar US\$20 juta per kilometer.

Saat ini status proyek monorel masuk dalam tahap persiapan di mana pemerintah telah menggandeng PT True North Bridge (TNB) Capital sebagai mitra konsultan untuk pengerjaan studi kelayakan. Adapun skema usaha untuk proyek ini adalah *public private partnership* (PPP).

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan dalam proyek pembangunan monorel di Sumsel ini sejumlah investor asal korea dan AS menyatakan tertarik untuk berinvestasi seperti Hyundai Group dan STA Engineering Group.

“Sudah banyak investor asal Korea dan Amerika Serikat yang tertarik untuk berinvestasi di Sumsel dalam pembangunan-

► Sumsel akan berkunjung ke Jepang untuk menawarkan langsung proyek monorel.

► Jakarta Monorel menyepakati permintaan pembayaran tiang pancang monorel.

nya,” katanya.

BUTUH SUBSIDI

Dalam kesempatan yang sama, Senior Consultant PT TNB Capital Djoko mengatakan untuk merealisasikan proyek monorel ini dibutuhkan dana subsidi sekitar US\$20 juta-US\$30 juta per tahun dari Pemprov Sumsel. Sementara itu, penyelesaian

pembayaran tiang monorel sudah mencapai titik temu. Pasalnya pihak PT Jakarta Monorel bersama konsorsiumnya Ortus Holdings, Ltd menyepakati permintaan pembayaran tiang pancang monorel dengan Adhi Karya yang membangun sebelumnya.

Juru bicara PT Jakarta Monorel Boovananto mengungkapkan penyelesaian pembayaran tiang pancang monorel dengan pihak Adhi Karya yang menjadi batu sandungan pelaksanaan proyek transportasi monorel akhirnya bisa diselesaikan dengan kata sepakat.

Menurut Boovananto, penyelesaian masalah tiang tersebut telah diselesaikan dengan nilai pembayaran Rp190 miliar untuk 90 tiang. (33)

Dinda Wulandari
redaksi@bisnis.co.id

Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Transportasi dan Pariwisata M Jhonson mengatakan pihaknya segera bertandang ke Jepang untuk menawarkan langsung proyek tersebut kepada Asosiasi Perkeretaapian Luar Negeri Jepang pada Juni 2013.

“Kami akan tawarkan proyek

monorel ini kepada investor Jepang karena mereka cukup berpengalaman dalam membangun moda transportasi ini,” katanya, Selasa (19/3).

Menurut dia, pemerintah juga akan membuat tim percepatan pembangunan monorel melalui Surat Keputusan Gubernur Sumsel untuk mendorong terealisasinya proyek transportasi itu.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Operasi Terminal Penumpang Terganggu	<div>- Terminal pelabuhan penumpang yang baru dibangun Pelindo I secara bertahap tahun lalu terancam tidak bisa didunakan karena alur pelabuhan menuju terminal baru teronggok bangkai kapal yang tenggelam puluhan tahun lalu</div> <div>- Penugasan untuk mengangkat bangkai kapal yang tenggelam bisa dilakukan Pelindo I Medan asalkan ada penugasan dari pemerintah</div>			Rp. 20 miliar		

▶ PELABUHAN BELAWAN

Operasi Terminal Penumpang Terganggu

MEDAN—Terminal penumpang yang dibangun PT Pelindo I Medan di Belawan senilai Rp20 miliar terancam tidak bisa digunakan karena sampai saat ini bangkai kapal yang tenggelam di alur pelabuhan menuju terminal baru itu belum diangkat.

Humas Pelindo I Medan Eriansyah membenarkan terminal pelabuhan penumpang yang baru dibangun Pelindo I secara bertahap tahun lalu terancam tidak bisa digunakan karena di alur pelabuhan menuju terminal baru tersebut teronggok bangkai kapal yang tenggelam puluhan tahun lalu.

“Kapal Pelni yang akan berlabuh dan sandar di terminal Penumpang akan terganggu karena bangkai kapal yang tenggelam 10 tahun lalu di alur pelabuhan bakal mengganggu,” ujarnya kepada *Bisnis* di Medan, Selasa (19/3).

Menurutnya, tugas mengangkat bangkai kapal yang tenggelam itu adalah urusan pemerintah yang hingga kini belum dilakukan. Padahal, jelasnya, pemindahan terminal penumpang domestik dari lokasi lama ke lokasi Belawan Lama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal sandar.

Bekas terminal penumpang lama, paparnya, dapat digunakan untuk sandar dan bongkar muat barang curah kering, sedangkan kapal penumpang sandar di Belawan lama yang kini dilengkapi den-

gan terminal baru berkapasitas 2.500 penumpang.

TUNGGU PENUGASAN

Sesungguhnya, kata dia, tugas mengangkat bangkai kapal tersebut berada di tangan Kementerian Perhubungan. Akan tetapi, lanjutnya, jika Kementerian Perhubungan menugaskan PT Pelindo untuk mengangkat bangkai kapal yang tenggelam tersebut, bisa saja dilakukan.

Penugasan untuk mengangkat bangkai kapal yang tenggelam sekitar 1980-an itu, paparnya, bisa dilakukan Pelindo I Medan asalkan ada penugasan dari pemerintah.

“Kalau tidak ada penugasan, maka tugas membersihkan bangkai kapal dari alur pelabuhan Belawan menjadi tanggung jawab pemerintah,” tuturnya.

Padahal, kata dia, pembangunan terminal penumpang yang baru itu didesain akan terintegrasi dengan angkutan kereta api dari Belawan. Penumpang yang turun dari kapal penumpang bisa langsung naik kereta api menuju Medan.

Persoalannya, menurut Eriansyah, pembangunan terminal penumpang kereta api di Belawan menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia yang mengintegrasikan terminal laut, terminal kereta api di Medan, dan bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. *(Master Sihotang)*



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ Jan ☐ Feb ☒ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jatim Benahi Bandara Abd Saleh	<div>- Untuk meningkatkan status bandara menjadi bandara internasional, maka dibutuhkan dukungan dana yang besar, terutama dari APBD Provinsi Jatim dan APBN</div> <div>- Masih banyak fasilitas-fasilitas yang harus ada dan dibangun</div> <div>- Memperhatikan kondisi saat ini, perubahan status Bandara Abd Saleh menjadi Bandara Internasional masih sangat jauh</div>			Rp. 23 miliar		

► BANDARA INTERNASIONAL

Jatim Benahi Bandara Abd Saleh

MALANG—Bandara Abd Saleh Malang Jawa Timur terus dibenahi sehingga layak dan memenuhi syarat menjadi Bandara Internasional.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang Malang Nazarudin Selian mengatakan saat ini sedang dibangun fasilitas terminal kedatangan di bandara tersebut.

“Sumber pendanaan proyek tersebut dari Pemprov Jatim,” katanya, Selasa (19/3).

Pemkab Malang, lanjut dia, mendukung penuh upaya menjadikan Bandara Abd Saleh menjadi Bandara Internasional. Pemkab setempat telah menginvestasikan dana dari APBD Kab. Malang Rp23 miliar untuk berbagai infrastruktur pendukung, terutama jalan masuk.

Kepala Dinas Bina Marga Kab. Malang Mochamad Anwar menambahkan setiap tahun Pemda setempat mengalokasikan dana Rp25 miliar untuk pemeliharaan jalan sepanjang 333 km, diantaranya termasuk jalan menuju Bandar Abd. Saleh.

Namun, lanjut dia, untuk meningkatkan status bandara tersebut menjadi bandara internasional, maka dibutuhkan dukungan dana yang besar, terutama dari APBD Provinsi Jatim dan APBN.

Infrastruktur yang ada masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan ditambah

Peningkatan terutama untuk terminal keberangkatan dan kedatangan. Juga diperlukan otoritas imigrasi, karantina, dan landasan pacu harus memenuhi syarat 3.000 meter.

Bandara berkapasitas penumpang sekitar 1.700 orang itu baru memiliki landasan pacu 2.250 meter. Layanan penerbangan baru terbatas Malang-Jakarta oleh Sriwijaya Air dan Garuda dan Wing Air pada rute Malang-Denpasar.

District Manager Sriwijaya Air Malang M. Yusrie menegaskan dengan memperhatikan kondisi saat ini maka perubahan status Bandara Abd Saleh menjadi Bandara Internasional masih sangat jauh.

Masih banyak fasilitas-fasilitas yang harus ada dan dibangun di bandara tersebut. Fasilitas dimaksud seperti area untuk penerbangan domestik dan internasional. Juga perlu adanya apron light.

Selain itu perlu dipasang instrument landing system (ILS). Dengan alat tersebut maka pesawat yang berada di bandara bisa terbang kapan pun, tidak terbatas sampai pukul 17.00 seperti saat ini.

Yang tidak kalah pentingnya pula, fasilitas otoritas kepabeanan. “Jadi masih sangat jauh.”

Operator yang beroperasi di bandara itu juga terbatas, baru tiga maskapai, yakni Sriwijaya Air, Garuda, dan Wings Air. (k24)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Dana Land Capping Telah Dibahas	<div>- Dana land capping merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembebasan lahan jalan tol</div> <div>- MNA telah mengajukan dana land capping Rp. 100 miliar</div> <div>- Penyerapan dana land capping ini tidak bisa cepat lantaran menunggu hasil dari proses pembebasan tanah yang dilakukan tim pengadaan tanah</div>					

▶ SURABAYA-MOJOKERTO

Dana Land Capping Telah Dibahas

JAKARTA—PT Marga Nujyasmoro Agung (MNA), pemegang konsesi jalan tol Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,27 km, telah membahas dana *land capping* dan mengajukan perubahan desain di beberapa pintu keluar dengan Kementerian PU.

Perubahan itu disebabkan ketika membuat desain jalan wilayah sekitar yang akan dilalui jalan tol belum ramai. Sementara untuk dana *land capping* MNA diperkirakan mengajukan Rp100 miliar.

Direktur Teknik MNA Edwin Cahyadi mengungkapkan sudah berdiskusi dengan Badan Pengatur Jalan Tol untuk membahas perubahan desain di beberapa pintu keluar jalan tol.

"Itu terkait dengan titik temu antara pintu keluar dengan jalan-jalan arteri di sekitarnya. Jalan di sekitar cukup ramai, sehingga kami ajukan beberapa alternatif perubahan ke BPJT," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (19/3).

Dana *land capping* merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembebasan lahan jalan tol. Dana itu dipakai untuk menanggung perubahan harga tanah dari nilai yang disepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), sehingga tetap layak secara finansial.

Edwin mengungkapkan pengerjaan konstruksi di lapangan mengalami beberapa kemajuan berarti. Pembebasan lahan, paparnya, memang masih menjadi hambatan, tetapi konstruksi akan terus dikerjakan.

Pembebasan lahan di Seksi IV masih belum tuntas. Sementara pembebasan lahan di Seksi II dan

III masih mengalami hambatan.

Dia menjelaskan pembebasan lahan di Seksi IV dari Krian-Mojokerto sepanjang 18,55 km menghadapi beragam persoalan di lapangan. Selain masalah ketidakcocokan harga tanah, juga ada masalah tanah desa, tanah warisan dan masih banyak hal lainnya yang menyebabkan pembebasannya terhambat. Hingga kini pembebasannya diperkirakan mencapai 70%-75%.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Ghazaly membenarkan bahwa MNA telah mengajukan dana *land capping* Rp100 miliar. Pihaknya terus mendesak penyelesaian pembebasan lahan sehingga pengerjaan konstruksi khususnya di seksi IV dapat berjalan sesuai target. Ia berharap pada tahun ini, seksi IV itu dapat beroperasi.

"Mereka meminta dana *land capping* yang belum keluar. Mereka sudah memakai dana sekitar Rp100 miliar, mungkin minggu ini bisa keluar."

Adapun, sejak 2009 Kementerian PU mengalokasikan dana *land capping* Rp4,5 triliun. Hingga kini dana *land capping* yang terserap baru Rp1,5 triliun.

Kasubdit Pengadaan Lahan Bina Marga Herry Marzuki sebelumnya mengungkapkan penyerapan dana *land capping* ini tidak bisa cepat lantaran menunggu hasil dari proses pembebasan tanah yang dilakukan tim pengadaan tanah. Pencairan dana ini akan dilakukan apabila harga tanah sudah melonjak melebihi 110% atau 2% dari total nilai investasi. (Thomas Mola)